



## DAFTAR PUSTAKA

### I. BUKU

- Badruzaman, Mariam Darius, 1983, *Perjanjian Kredit Bank*, Cetakan Ketiga, Alumni, Bandung.
- Badruzaman, Mariam Darius, 1983, *KUH Perdata Buku III Tentang Hukum Perikatan Dengan Penjelasannya*, Alumni, Bandung.
- Black, Henry Campbell, 1991, *Black's Law Dictionary*, Abridged Sixth Edition by The Publisher's Editorial Staff, West Group.
- Kasmir, 2001, *Manajemen Perbankan*, Edisi Pertama, Cetakan Kedua, PT Raja Gafindo Persada, Bandung.
- Lee Mei Pheng, 1955, *Banking Law*, Butter Worths Asia, Malaysia.
- Mertokusumo Sudikno, 1999, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Edisi Keempat, Cetakan Kedua, Liberty, Yogyakarta.
- Prodjodikoro Wiryono, 1981, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan Tertentu*, Sumur, Bandung.
- Rahman Hasanuddin, 2000, *Kebijakan Kredit Perbankan Yang Berwawasan Lingkungan*, Cetakan Pertama, PT Citra Adutya Bakti, Bandung.
- Sembiring, Sentosa, 2000, *Hukum Perbankan*, Cetakan Pertama, PT Mandar Maju, Bandung.
- Setiawan, R, 1979, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Cetakan Kedua, Percetakan Ekonomi, Bandung.
- Sjahdeini, Sutan Remi, 1993, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia*, Cetakan Pertama, IBI, Jakarta.
- Soekanto Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan Ketiga, UI-Press, Jakarta.
- Sutantio Retnowulan, 1996, *Upaya Hukum Dalam Penagihan Kredit Macet dan Eksekusi Jaminan*, Diskusi Panel III, Pengurusan Piutang dan Lelang Negara, Medan.



Sumardjono, Maria SW, 1989, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian, Sebuah Pengantar Dasar*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

## II. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

KUH Perdata (Burgelijk Wetboek Staatblad 1847 Nomor 23) Terjemahan Prof. R. Subekti dan R. Tjitrosudibyo.

Undang-undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan jo Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU Nomor 7 Tahun 1992.

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1976, Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1990 dan Keputusan Presiden Nomor 177 tahun 2000.

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 445/KMK.01/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara dan Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara.

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 61/KMK.08/2002 tentang Panitia Urusan Piutang Negara.

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2002 tentang Pengurusan Piutang Negara.

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 303/KMK.01/2002 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 335/KMK.01/2000 tentang Crash Program Pengurusan Piutang Negara Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 505/KMK.01/2000.

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 304/KMK.01/2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 305/KMK.01/2002 tentang Pejabat Lelang.



Keputusan Menteri Keuangan Nomor 306/KMK.01/2002 tentang Balai  
Lelang.

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 425/KMK.01/2002 tentang Perubahan  
Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 445/KMK.01/2001 tentang  
Instansi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktur Jenderal Piutang dan  
Lelang Negara dan KP2LN.